KUALITAS USIA PERKAWINAN, MOTIF, FAKTOR DAN DAMPAKNYA DI KABUPATEN WONOSOBO

Mahfudz Junaedi*

Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo

Email: mahfudzjunaedi@unsiq.ac.id

Abstract

Marriage institutions are still believed to be the initial process in shaping human civilization, because marriage will give birth to a quality and civilized generation so that holistic preparation is needed. However, the process of the formation of marriage is largely influenced by internal and external factors surrounding conditions, especially by religious, socio-cultural teachings and beliefs, the quality of human resources, environment, governance and regional disparities as regional objective conditions. Wonosobo as one of the regency cities in Central Java with a high poverty rate which occupies the fourth position with a range of 11.32%. In 2018 the poverty rate in Wonosobo is around 17.58%. Demographic bonuses with indicators of human quality at each stage of age in their growth and development are influenced by economics, formal education, parenting, health and culture. With this kind of objective condition, the phenomenon of the high age of young marriage in Wonosobo with its motives and background. This study focuses on issues (1) how the motives and factors affect young marriage, (2) how the life cycle needs to be prepared by young families, and (3) why young marriage is still high in Wonosobo. The method used in this research is field research by basing data sources and analyzing data holistically from related institutions / agencies, such as Bapeda data, PPKBPPPA (BKKBN) service, Wonosobo District Ministry of Religion, Wonosobo Religious Court and other directly related parties and indirect population data, as well as informants of young marriage actors. The expected results of the research are to find out the motives and background of young marriages, so that solutions are found in providing policies, programs and socialization. To provide information and the importance of preparing important life cycle strategies and strategies in the first 1000 days of life, and finding the root of the problem is the high number of young marriage in Wonosobo. So we need the synergy of all stakeholders in finding solutions and alternative solutions.

Keywords: Marriage institutions, quality of age.

Abstrak

Lembaga perkawinan masih dipercaya sebagai proses awal dalam membentuk peradaban manusia, karena dengan perkawinan akan melahirkan generasi berkualitas dan beradab sehingga diperlukan kesiapan secara holistik. Namun demikian, proses terbentuknya perkawinan banyak dipengaruhi oleh faktor internal dan eksternal kondisi yang melingkupinya, terutama oleh ajaran dan keyakinan agama, sosio-kultural, kualitas sumber daya manusia, lingkungan hidup, tata kelola pemerintahan dan kesenjangan wilayah sebagai kondisi objektif daerah. Wonosobo sebagai salah satu kota kabupaten di Jawa Tengah dengan tingkat kemiskinan yang masih tinggi dengan menempati posisi keempat dengan kisaran 11,32%. Tahun 2018 angka kemiskinan di Wonosobo pada kisaran 17,58 %. Bonus demografi dengan indikator kualitas manusia pada setiap tahapan umur dalam tumbuh kembangnya dipengaruhi oleh ekonomi, pendidikan formal, pola asuh, kesehatan dan

---

* Dosen Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Sains Al-Qur'an (UNSIQ) Wonosobo.

budaya. Dengan kondisi objektif semacam inilah, fenomena tingginya perkawinan usia muda di Wonosobo dengan motif dan latar belakangnya. Penelitian ini dengan fokus permasalahan (1) bagaimana motif dan faktor yang mempengaruhi perkawinan usia muda, (2) bagaimana siklus kehidupan yang perlu dipersiapkan oleh keluarga muda, dan (3) mengapa perkawinan usia muda masih tinggi di Wonosobo. Metode yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah *field research* dengan mendasarkan sumber data dan analisa data secara holistik dari lembaga-lembaga/instansi terkait, seperti data Bapeda, dinas PPKBPPPA (BKKBN), Kementerian Agama Kabupaten Wonosobo, Pengadilan Agama Wonosobo serta pihak-pihak terkait langsung maupun tidak langsung data kependudukan, maupun informan pelaku perkawinan usia muda. Hasil penelitian yang diharapkan adalah untuk mengetahui motif dan latar belakang perkawinan usia muda, sehingga ditemukan solusi dalam memberikan kebijakan, program dan sosialisasinya. Untuk memberikan informasi dan pentingnya mempersiapkan penting dan strategi siklus kehidupan dalam 1000 hari pertama kehidupan, dan menemukan akar permasalahan masih tingginya perkawinan usia muda di Wonosobo. Sehingga diperlukan sinergitas semua stakeholder dalam mencari solusi dan alternatif pemecahannya

Kata Kunci : Lembaga perkawinan, kualitas usia, siklus kehidupan 1000 hari pertama.

Pendahuluan

Lembaga perkawinan hingga sampai sekarang masih dipercaya sebagai proses awal dalam membentuk peradaban manusia, karena dengan perkawinan tatanan manusia dan masyarakat dapat ditentukan. Dalam Islam perkawinan adalah hal yang sakral dalam kerangka untuk menyatukan pasangan yang berbeda jenis untuk dapat bercampur guna membentuk hubungan keluarga dan membina rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), perkawinan sebagai ikatan yang kuat (*mistaqon ghalidlon*) sehingga terciptanya hubungan suami-istri yang sakinah, mawwadah dan rahmah, serta barokah. Perkawinan bagi masyarakat Muslim di Indonesia diatur secara spesifik dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang secara legal format mengatur syarat dan rukun dalam perkawinan¹. Meskipun dalam hal usia calon pengantin (catin) laki-laki dan perempuan dalam konteks sekarang banyak digugat, karena usia perkawinan menggunakan batas terendah yaitu usia 16 tahun bagi perempuan, dan 19 tahun bagi laki-laki. Pembatasan usia minimal untuk kawin dimaksudkan agar orang yang menikah diharapkan sudah memiliki kematangan berpikir, kematangan jiwa dan kekuatan fisik yang mencukupi dan memadai. Batas usia minimal dalam perkawinan, akhir-akhirnya telah menimbulkan dampak multidimensional, baik dalam aspek sosial, ekonomi, budaya atau tradisi, hingga agama yang ujungnya dalam pelanggaran hak-hak perempuan sebagai warga negara².

---

¹ Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 1; lihat juga dalam PP Nomor 9 Tahun 1975 tentang Peraturan Pemerintah atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan; lihat juga, Kompilasi Hukum Islam.

² Djamilah dan Reni Kartikawati, "Dampak Perkawinan Anak di Indonesia", *Jurnal Studi Pemuda*. Vol. 3, No. 1, Mei 2014, hlm. 3

Secara hukum pernikahan dini (*early marriage*) dilegitimasi oleh Undang-Undang RI. Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Dalam undang-undang tersebut memperbolehkan anak perempuan berusia 16 tahun untuk menikah, seperti disebutkan dalam pasal 7 ayat 1, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai 19 (sembilan belas) tahun, dan pihak wanita sudah mencapai 16 (enam belas) tahun”. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, terutama pada pasal 26 menyatakan, bahwa orang tua diwajibkan melindungi anak dari perkawinan usia dini. Meskipun pasal ini, sebagaimana Undang-Undang Perkawinan, tanpa menyertakan dengan adanya sanksi pidana sehingga ketentuan tersebut tidak memberikan dampak dalam melindungi anak-anak dari ancaman perkawinan dini. Lemahnya pengawasan dan penegakan hukum, khususnya UU Perkawinan dan UU Perlindungan Anak terhadap perkawinan usia dini memberikan celah bagi siapapun, termasuk orang tua untuk menikahkan anak perempuan dibawah usia 16 tahun. Meskipun secara legal batas usia perkawinan wanita 16 tahun dan 19 tahun bagi laki-laki atau dibawah suami 19 tahun termasuk dikategorikan dalam usia muda atau pubertas yang disebut juga sebagai perkawinan dini, karena batasan usia remaja yaitu usia antara 10-19 tahun. Apabila usia tersebut telah melakukan ikatan lahir batin sebagai seorang suami istri dengan tujuan membentuk keluarga dikatakan sebagai pernikahan dini atau perkawinan muda.

Kualitas usia perkawinan anak (dini) selalu dihubungkan dengan kompleksitas kemiskinan dan faktor sosial budaya dan pemahaman agama yang mengitarinya, kondisi ini selalu diiringi dengan tingkat pendidikan yang rendah karena ketidakmampuan ekonomi dalam keluarga sehingga mendorong orang tua untuk menikahkan anak perempuan dalam rangka mengurangi beban ekonomi keluarga. Ada stigma di pedesaan, jika perempuan tidak cepat dinikahkan dan menjadi perawan tua orang tua yang menanggung malu, sehingga kalau perempuan sudah menikah untuk kebutuhan hidupnya akan ditanggung pihak suami meskipun secara finansial, mental dan umur belum siap. Perkawinan usia anak di Wonosobo cenderung meningkat setiap tahunnya,

terutama prevalensi anak perempuan usia 16 dan 17 tahun. Ada hubungan yang kompleks antara perkawinan usia anak dan tingkat pendidikan yang rendah serta kondisi sosial ekonomi, budaya setempat. Anak perempuan yang menikah sebelum usia 18 tahun memiliki pencapaian pendidikan yang lebih rendah dibandingkan dengan anak perempuan yang belum menikah, khususnya setelah mencapai pendidikan tingkat menengah pertama (SMP). Analisis ini menunjukkan bahwa perkawinan usia anak sangat terkait dengan kemiskinan, meskipun prevalensi perkawinan usia anak yang tinggi terdapat pada daerah kecamatan dengan tingkat kemiskinan yang relatif rendah. Dalam kasus tertentu, pasangan terpaksa melakukan perkawinan usia dini, disebabkan pihak perempuan hamil sebelum menikah, pada tahun 2018 terdapat 306 (4,6%) dari data jumlah perkawinan 6645, dan terdapat 124 (1,9 %) nikah dengan dispensasi dengan rincian catin laki-laki 83 (67%), catin perempuan 41 (33%).³ Adapun Data penduduk Kabupaten Wonosobo tahun 2018 dengan rincian laki-laki sejumlah 449.665 (51,1 %), dan perempuan 428.946 (48,8%), sedangkan angka kemiskinan di Wonosobo pada level 17,58%, sedangkan tingkat Jawa Tengah menempati pada posisi 11,32%. Secara umum kemiskinan yang terjadi di Wonosobo dipengaruhi oleh tata kelola pemerintah, kualitas sumber daya manusia, lingkungan hidup, dan kesenjangan wilayah antara wilayah atas dan bawah. Kondisi tersebut, mempengaruhi pada faktor ekonomi, pendidikan (formal, agama, dan pola asuh), kesehatan dan sosial budaya.⁴

Dari kondisi objektif di Wonosobo dengan status sebagai kabupaten termiskin dan menempati pada urutan keempat pada tingkat Jawa Tengah telah memberikan dampak nyata pada kehidupan sosial, ekonomi, budaya, pendidikan dan agama terhadap kualitas usia perkawinan di wilayah Wonosobo dan menunjukkan signifikasinya pada perkawinan usia dini. Metode diskriptif kualitatif dengan menggunakan sampling 3 kecamatan di wilayah Wonosobo. Pengumpulan data melalui dokumentasi, wawancara mendalam dan observasi pada pelaku perkawinan dini. Data dari Kementerian Agama Wonosobo pada tahun 2018.

Kerangka Teori dan Konsep

Di negara Indonesia pembatasan usia minimal untuk melangsungkan perkawinan bagi warga negara pada prinsipnya agar orang yang akan menikah diharapkan sudah memiliki kematangan serta kedewasaan dalam berpikir, kematangan jiwa dan jasmani yang memadai, sehingga tujuan perkawinan yang menekankan pada aspek kebahagiaan lahir dan batin dapat tercapai,

---

³ Badan KB Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Wonosobo, Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2035.

⁴ Badan KB Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Badan Statistik, Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Kabupaten Wonosobo, Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2014.

sebagaimana ketentuan secara normatif dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 7 bahwa perkawinan hanya diijinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun. Meskipun dalam implementasinya banyak sekali terjadi pelanggaran atas undang-undang tersebut. Masih banyak orang tua yang menikahkan anaknya meskipun belum memenuhi kriteria atau syarat untuk menikah. *Convention on the Rights of the Child* (CRC), mendefinisikan perkawinan anak sebagai perkawinan yang terjadi di bawah usia 18 tahun. Secara legal formal belum ditetapkan tentang rentang usia berapa sesungguhnya seseorang dapat disebut anak dan bentuk relasi seperti apa yang dapat disebut perkawinan.

Meskipun secara agama tolok ukurnya adalah *baligh* (secara biologis) atau adat istiadat dianggap sah, tetapi perkawinan yang dilakukan di luar pengetahuan dan pengawasan pegawai pencatat nikah dan tidak dicatatkan dianggap tidak sah di mata hukum. Sistem hukum di Indonesia tidak mengenal istilah “kawin dibawah tangan”. Secara sosiologis, kawin yang tidak dicatatkan dan dianggap tidak memenuhi ketentuan undang-undang (UU Perkawinan pasal 2 ayat 2). Oleh sebab itu, perkawinan anak atau perkawinan dini merupakan praktik tradisional yang sudah lama ada dan tersebar di seluruh Indonesia. Studi pustaka mencatat ada 3 (tiga) pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan, dan perkawinan anak karena *married by accident* (MBA) atau hamil sebelum perkawinan. Sehingga perkawinan anak perempuan yang dilakukan sebelum usia 18 tahun, secara fisik, fisiologis, dan psikologis belum siap memikul tanggung jawab perkawinan dan pengasuhan anak. Studi pustaka mencatat dua pola perkawinan anak, yaitu menikahkan anak perempuan dengan laki-laki dewasa dan menjodohkan anak laki-laki dengan perempuan yang dilakukan oleh orang tua kedua anak yang bersangkutan, mengungkapkan bahwa mayoritas perempuan di Indonesia menikahkan anak perempuan sebelum usia 18 tahun berpandangan bahwa mereka menikah terlalu dini adalah keinginan orang tuanya.⁵

Kualitas usia perkawinan merupakan pelaksanaan perkawinan yang dilaksanakan belum pada waktunya atau umur pasangan calon pengantin laki-laki dan perempuan pada level umur $\leq 16 - 19$ tahun merupakan batas minimal sebagaimana yang diatur secara legal formal dalam undang-undang perkawinan. Sesuatu yang dilarang oleh agama maupun undang-undang tentang perkawinan tentu saja tidak baik bagi manusia, dalam hal ini tentu berkaitan dengan perkawinan di bawah umur yang dilakukan akan menghasilkan dampak yang kurang baik bagi pasangan tersebut. Keburukan yang dapat terjadi akibat perkawinan di bawah umur, seperti meningkatnya perceraian, karena

---

⁵ Choe, MK., S. Thapa, dan S. Achmadi, *Early Marriage and Childbearing in Indonesia dan Nepal*, Honolulu: East-West Center Working Papers No. 108-15, 2017, hlm. 110.

perkawinan dilakukan pasangan yang belum matang secara umur, kedewasaan, berpikir sehingga rentan terjadinya percekocokan yang berujung pada putusnya hubungan suami-istri. Secara fisik bagi perempuan yang masih dibawah umur belum siap untuk melahirkan sehingga memberikan dampak pada kesehatan reproduksi.

Kualitas usia perkawinan, khususnya di Wonosobo dipicu banyak faktor, salah satu faktor yang sering dituduhkan adalah masalah kemiskinan. Secara konseptual kemiskinan tidak berdiri sendiri, tetapi banyak faktor yang secara serkiler saling terhubung, seperti faktor ekonomi, sosial, pendidikan, budaya dan pemahaman agama. Untuk mengukur kemiskinan sebagaimana yang dikonsepskan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) adalah menggunakan konsep kemampuan pemenuhan kebutuhan dasar (*basic need approach*).⁶ Dengan pendekatan ini, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Dengan kata lain, kemiskinan dipandang sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan makanan maupun non makanan yang bersifat mendasar.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan diskriptif-analitis dengan teknik pengumpulan data berupa diskusi kelompok terfokus (FGD) pada kelompok FAPSEDU dan wawancara mendalam. Diskusi kelompok terfokus dan wawancara mendalam dilakukan agar peneliti dapat memahami secara mendalam dari sudut informan penelitian berdasarkan konteks sosial budaya pada setiap desa yang dijadikan sampel penelitian. Dalam hal ini dilakukan di wilayah 3 (tiga) wilayah kecamatan yang dipilih, yakni: Kecamatan Kepil, Wadaslintang dan Kecamatan Watumalang.

Untuk pengumpulan data kualitas yang digunakan adalah diskusi kelompok yang dilaksanakan oleh FAPSEDU (Forum Antar Muta Beragama Peduli Keluarga) Kabupaten Wonosobo jumlah peserta diskusi 10-12 orang anggota Fapsedu, untuk menganalisis data dengan menghadirkan kelompok remaja tidak melakukan perkawinan usia dini, serta wawancara yang mendalam dengan remaja pelaku usia perkawinan dini, termasuk dengan orang tua pelaku usia perkawinan dini. Guna memperkuat data dan analisis data, peneliti melakukan wawancara mendalam dengan KUA setempat, tokoh masyarakat, untuk menggali informasi terkait dengan aturan perkawinan dini, dan norma budaya terkait seksualitas, persoalan kesehatan reproduksi, penyebab adanya perkawinan anak, dampak ekonomi, sosial, kesehatan, serta perceraian yang menjadi permasalahan perkawinan anak di wilayah Kabupaten Wonosobo.

---

⁶ BKKBN, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: Penerbitan BKKBN Pusat, 2013, hlm. 9

Kualitas Usia Perkawinan, Faktor dan Dampaknya

Fenomena sosial di masyarakat Wonosobo dalam menentukan kualitas usia perkawinan disamping mengikuti ketentuan legal formal undang-undang, juga ada disparitas atas tafsir agama dengan kedewasaan (*baligh*), sehingga masyarakat menganggap bahwa usia 16 – 19 tahun pasangan pengantin sudah dianggap dewasa dan dibenarkan oleh agama. Hasil penelitian menemukan bahwa ada beberapa faktor yang berpengaruh terhadap kualitas usia perkawinan anak, di antaranya, adalah faktor pendidikan, kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi pada remaja sehingga menyebabkan perilaku seks berisiko di kalangan anak-anak, faktor ekonomi (kemiskinan), faktor budaya (tradisi/alat), perjodohan, pergaulan bebas (positif hamil), dan penafsiran agama.

Faktor Pendidikan: Perilaku Seks Berisiko dan Kurangnya Pemahaman Pendidikan Kesehatan Reproduksi Remaja

Pendidikan secara umum menjadi faktor penyebab paling utama terhadap kualitas usia perkawinan anak, karena mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi. Alasan yang ditemukan adalah remaja- remaja yang mencoba-coba melakukan aktivitas seksual di masa berpacaran dengan pasangannya. Akan tetapi, karena kurang terbukanya pendidikan kesehatan reproduksi yang masih dianggap sebagai pembicaraan yang tabu, remaja kemudian terjebak dengan lingkaran yang sulit mereka lepaskan. Manakala sudah terlambat, yang terjadi kemudian seperti efek domino, yakni terjadi kehamilan tidak diinginkan, putus sekolah karena malu atau “dipaksa” mengundurkan diri oleh pihak sekolah karena melanggar tata tertib sekolah yang berlaku. Selain itu, ketidaksiapan secara fisik dan psikologis untuk menjadi orang tua dapat menyebabkan anak yang dilahirkan menjadi telantar, mengalami gizi buruk, dan dari segi sosial ekonomi berdampak pada peningkatan pengangguran terselubung dan memunculkan lingkaran kemiskinan yang baru.

Pergaulan bebas yang terjadi di masyarakat sekarang, termasuk sudah menjadi gejala umum dan terjadi juga di masyarakat pedesaan. Kehamilan yang tidak diinginkan karena faktor kurangnya pemahaman kesehatan reproduksi yang banyak terjadi pada anak-anak menjadi salah satu faktor utama perkawinan muda. Rendahnya keterbukaan informasi yang tepat antara anak dan orang tua, demikian juga bebasnya remaja dalam mengakses informasi teknologi melalui handphone, android dan sebagainya membuat remaja tidak mengetahui risiko pilihan dalam menentukan yang terjadi pada reproduksinya. Berikut petikan wawancara dengan anak yang menikah muda,

“Pertama kali ML (making love) karena mencoba-coba karena banyak teman-teman yang bilang, coba ML karena enak katanya. Kalau risiko, ya gak

disebutkan karena itu risiko sendiri dan ga tau kalau so bisa hamil kalau cuma sekali melakukan.”⁷

Kurangnya pemahaman terhadap risiko pilihan juga berdampak pada pemahaman konsep pacaran dan konsep diri mereka yang ditemukan di beberapa daerah penelitian. Kasus lainnya dari kurangnya pendidikan kesehatan reproduksi dan seksual pada remaja juga menyebabkan remaja tidak memiliki pilihan atau *bargaining position* yang lemah khususnya yang terjadi pada remaja perempuan. Remaja perempuan rentan mengalami kekerasan seksual, baik pada masa pacaran maupun pada saat berumah tangga. Beberapa remaja mengaku bahwa mereka melakukan hubungan seksual pertama kali karena ingin menyenangkan pacarnya sebagai sebuah bentuk pelayanan dan kesetiaan.

Kasus perilaku berisiko lainnya adalah adanya anggapan bahwa kegiatan seks pra-nikah dengan berganti-ganti pasangan pada remaja khususnya remaja laki-laki sebagai suatu kebanggaan dan ajang mempertontonkan maskulinitas di kalangan remaja se-usia mereka. Hal ini terungkap dari hasil FGD remaja perempuan yang tidak menikah muda, berikut kutipannya:

“Kalau laki-laki itu biasanya yang suka mengaku, mereka malah sudah ML seringnya sama cewek beda-beda, mereka bangga dan sombong kalau sudah melakukan hubungan dengan pacarnya... Kalau ceweknya malu-malu biasanya lebih tertutup dan rata-rata awalnya karena coba-coba dan biar pacarnya jadi tergantung sama cowoknya. Kalau perempuan cenderung tertutup...”⁸

Kasus yang lain terjadi ketika salah satu informan yang di temui dan mengatakan bahwa dirinya menjadi taruhan pacar dan teman-temannya tanpa sepengetahuannya, sementara pacarnya meminta dirinya melakukan hubungan seksual dengan alasan pembuktian cinta dan sayangannya. Para remaja banyak yang menikah muda dan putus sekolah karena keinginan mereka sendiri karena perkawinan usia dini. Padahal, denda sebagai kontrol sosial untuk meminimalisir angka perkawinan anak sudah dilakukan oleh pemerintah dan tokoh masyarakat dengan mewajibkan membayar denda yang tinggi. Kondisi ini disebabkan faktor orang tua yang tidak bisa menolak apabila anak gadis perempuannya sudah dilamar orang lain. Orang tua tidak mampu menolak lamaran, karena dianggap tabu atau pamali. Masih adanya anggapan bahwa menolak lamaran orang lain, dikawatirkan akan anak gadisnya tidak laku kawin.

Faktor seks yang berisiko berkaitan erat dengan tidak adanya pengetahuan atau pendidikan yang cukup mengenai kesehatan reproduksi dan seksual. Bahaya perilaku seks berisiko ditambah dengan mudahnya mendapatkan perangkat teknologi informasi membuat slogan ‘*dunia di tangan anda*’ menjadi ironi tersendiri dalam kasus pernikahan anak. Tidak terbantahkan

---

⁷ Wawancara mendalam, R, Remaja Laki-laki menikah muda, di Kecamatan Kepil, Kabupaten Wonosobo, 3 Januari 2019

⁸ FGD FAPSEDU Kabupaten Wonosobo bersama dengan Remaja laki-laki dan perempuan belum menikah muda di Wonosobo, pada tanggal 9 Februari 2019. Di Kantor BKKBN Kabupaten Wonosobo.

lagi, bahwa penggunaan sosial media yang sangat mudah dan sulit untuk dibatasi, membuat anak lebih mudah menjalani pertemanan dengan orang-orang yang tidak mereka kenal. Sayangnya akses informasi yang begitu mudah dan cepat tidak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup dan pengawasan dari pihak keluarga. Belum lagi minimnya pengetahuan kesehatan reproduksi yang tepat karena isu ini masih dianggap tabu membuat anak tidak memiliki batas kontrol yang jelas atas tubuhnya dan memiliki posisi tawar yang lemah bila dihadapkan dengan pilihan-pilihan kesehatan reproduksi dan seksualitasnya.

Faktor lainnya adalah pendidikan orang tua berpengaruh terhadap kualitas usia perkawinan anak. Faktor pendidikan orang tua yang rendah, karena keterbatas ekonomi dan atau karena sulitnya mendapatkan akses pendidikan pada saat orang tuanya masih remaja, menjadi salah satu masalah, sehingga faktor rendahnya pendidikan orang tua menyebabkan rendahnya pemahaman mengenai kesehatan reproduksi. Keterbatasan atas pemahaman kesehatan reproduksi oleh orang tua menyebabkan kawin pada usia dini dianggap hal yang biasa dan sudah terjadi pada umumnya masyarakat di desa. Orang tua kurang memberikan motivasi kepada anak untuk memprioritaskan pendidikan anak, sehingga anak kurang serius dalam belajar dan kurang bersemangat untuk memiliki masa depan yang lebih baik, dan keterbatasan biaya pendidikan menyebabkan orang tua membatasi keinginan anaknya untuk melanjutkan pendidikan jenjang yang lebih tinggi.

Faktor Kemiskinan

Faktor ekonomi yang dilatar belakangi oleh alasan kemiskinan merupakan salah satu penyebab terjadinya perkawinan anak. Kemiskinan rumah tangga orang tua menjadi faktor dominan pada kualitas usia perkawinan. Keterbatasan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan untuk makan, tempat tinggal, membeli pakaian dan kesehatan. Faktor kemiskinan ini bisa juga terjadi untuk memprioritaskan pendidikan lebih kepada anak laki-laki terutama ketika para orang tua mempunyai keterbatasan kemampuan untuk menyekolahkan anak-anaknya, sehingga anak perempuan dinikahkan secepatnya untuk mengurangi beban ekonomi. Menurut beberapa faktor masyarakat, anak laki-laki bukan halnya mendapatkan prioritas pendidikan sampai SLTA tetapi juga dicarikan pekerjaan. Alasan orang tua menikahkan anaknya karena pendapatan dan kebutuhan ekonomi yang tidak tetap dan minim untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama karakteristik kelompok keluarga di wilayah desa. Menikahkan anak merupakan sebuah praktik mengurangi beban biaya terutama biaya pendidikan. Di samping itu, pemikiran menambah pendapatan keluarga dengan menikahkan anak masih menjadi sebuah alternatif, bahkan tidak jarang di temukan kasus orang tua menikahkan anaknya sebagai pembayar hutang keluarga. Pada akhirnya apabila mereka menikah dan putus sekolah anak-anak tersebut akan masuk ke dalam dunia pekerjaan informal. Hal ini dimungkinkan karena persyaratan bekerja jauh

lebih mudah di terima karena anak sudah tidak lagi mengenyam pendidikan dan dianggap secara sosial sudah matang.

Masalah kemiskinan lainnya adalah orang tua yang mencari pekerjaan diluar daerahnya dan meninggalkan anak-anaknya tanpa pengetahuan dan pendidikan yang cukup sehingga anak-anaknya mencari pengetahuan dan pemahaman di tempat lain. Wonosobo merupakan daerah pemasuk buruh migran keluar kota, bahkan keluar negeri menjadi Tenaga Kerja Wanita (TKW). Ketika orang tua bekerja, mereka absen dalam mengawasi anak-anak mereka, hal inilah yang menyebabkan seorang anak menerima informasi uang tidak berimbang. Pengabaian pengawasan dan kontrol anak tidak ada dan anak cenderung bebas, sehingga mencari informasi lain yang tidak tepat.

Beberapa data Susenas menunjukkan adanya hubungan antara perkawinan anak dan status ekonomi yang dilihat berdasarkan kondisi perumahan dan distribusi pengeluaran rumah tangga, sehingga analisis yang didapatkan bahwa perkawinan usia anak yang tertinggi terjadi pada perempuan yang tinggal di pedesaan dengan kondisi perumahan yang tidak layak huni (miskin). Meskipun data tersebut merupakan data kuantitatif, perkawinan anak tidak semata-mata oleh karena kemiskinan orang tua saja, faktor kualitas pendidikan orang tua dan anak, serta pergaulan bebas remaja sekarang juga menunjukkan signifikansinya kasus-kasus perkawinan anak.

Faktor Tradisi/adat dan Agama

Faktor lainnya penyebab dari perkawinan anak adalah faktor budaya berupa tradisi, adat, dan atau agama. Informasi kesehatan reproduksi dianggap sebagai sesuatu yang tabu, porno, dan dosa. Hal ini menjadi salah satu alasan terjadinya perkawinan anak. Dalam hal ini ketabuan membicarakan hal terkait pendidikan kesehatan reproduksi dan seksualitas pada anak tidak mengerti mengenai kesehatan reproduksi dan seksual sehingga ingin coba-coba dan mencari tahu sendiri dari media lainnya seperti internet (video porno), selain sekolah, guru dan orang tua. Hal ini dikemukakan karena mereka tidak mendapat informasi yang lengkap dan kadangkala mendapatkan stigma dan disaat bersamaan mengalami penolakan untuk membicarakan. Ditemukan bahwa anggapan perkawinan anak menjadi salah satu penyelesaian masalah yang tepat untuk kehamilan tidak diinginkan dan menghindari dosa, serta "omongan" masyarakat akan status anak yang dilahirkan nantinya. Pernikahan anak juga dianggap menghindari zina, dan takut dosa. Bahkan ada pula anak yang sudah di atur perjodohan untuk mendapatkan keturunan yang baik, walau usian anak tersebut masih jauh di bawah umur.

Dampak Kualitas Usia Perkawinan Anak

Dampak yang teridentifikasi atas kualitas usia perkawinan diantaranya adalah penyebab anak menjadi putus sekolah, instabilitas di dalam membangun keluarga, terjadinya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), serta subordinasi

perempuan yang menyebabkan pada kondisi sosial, ekonomi, kesehatan dan dampak psikologis.

1. Sosial Ekonomi

Kualitas usia perkawinan atau perkawinan usia dini pada aspek sosialekonomi menimbulkan adanya “siklus kemiskinan” yang baru. Anak remaja ($\leq 15-16$ tahun) seringkali belum matang dan mapan atau tidak memiliki pekerjaan yang layak dikarenakan tingkat pendidikan yang masih rendah. Kondisi ini menyebabkan anak yang sudah menikah menjadi tanggungan keluarga khususnya orang tua dari pihak laki-laki (suami). Akibatnya, orang tua memiliki beban ganda, selain harus menghidupi anggota keluarga, orang tua juga harus menghidupi anggota keluarga baru, kondisi menjadi beban berat bagi keluarga orang tua yang dikategorikan keluarga miskin. Kondisi ini akan berlangsung secara repetitif turun temurun dari satu generasi ke generasi selanjutnya sehingga kemiskinan struktural akan terbentuk. Dampak ekonomi seperti di atas yang secara riil terjadi di masyarakat Wonosobo yang menjadi kantong-kantong tingginya tingkat perkawinan usia dini. Kondisi ini berbeda apabila pasangan laki-lakinya jauh lebih tua (dewasa) dari sisi kualitas usianya (23-27 tahun) dan memiliki pendidikan yang cukup tinggi, sehingga mempunyai pekerjaan dan penghasilan yang layak untuk menghidupi keluarga.

Ditinjau dari aspek sosial, perkawinan dengan kualitas usia dini berdampak pada potensi perceraian dan perselingkuhan dikalangan pasangan muda yang baru menikah. Data Pernikahan Anak Tahun 2018 di Wonosobo dengan rentang usia $\leq 16-19$ tahun sejumlah 2186, dengan jumlah tertinggi di wilayah Kecamatan Kepil, sejumlah 301 kasus, Kecamatan Kalikajar sejumlah 229 kasus. Dua kecamatan tersebut merupakan kantong-kantong kecamatan dengan kondisi miskin. Kondisi kualitas perkawinan usia dini sangat rentan terjadinya pertengkaran dalam menghadapi masalah kecil, mengingat emosi yang masih belum stabil. Adanya pertengkaran terkadang juga menyebabkan timbulnya kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual terutama yang dialami oleh istri dikarenakan adanya relasi hubungan yang tidak seimbang. Angka kekerasan terhadap anak tahun 2018 terjadi 77 kasus, kondisi ini menyebabkan putusnya perkawinan atau gugatan perceraian yang dilakukan oleh istri. Kondisi ini, menyebabkan angka perceraian di wilayah kabupaten Wonosobo sangat tinggi, dan Wonosobo merupakan 3 (tiga) kabupaten di Jawa Tengah dengan tingkat perceraian tertinggi. Dampak domino atas kondisi tingginya perceraian di Wonosobo, perkawinan usia dini termasuk penyumbang atas tingginya perceraian di Wonosobo. Data Perkawinan di Kemenag Kabupaten Wonosobo tahun 2018 sejumlah 6645 pernikahan dengan perincian; jumlah catin perempuan hamil 304 (4,6 %); jumlah nikah dispensasi 124 (1,9%) dengan jumlah catin laki-laki 83 (67%) dan catin perempuan 41 (33%). Dari jumlah perkawinan 6645 perkawinan anak

dengan usia ≤ 19 tahun mencapai 2186.⁹ Dampak sosial lainnya, seperti banyak kasus inses dan kekerasan seksual pada anak dan putusnya hubungan perkawinan sangat tinggi, yang terakhir pada banyaknya janda muda, menjadi buruh migran, dan dampak negatifnya adalah menjadi pekerja seks komersial di beberapa wilayah kota terdekat.

Putusnya anak sekolah disebabkan kehamilan tidak diinginkan dan harus dipindah keluar lingkungannya, lalu dinikahkan, dan akhirnya terpaksa melahirkan memberikan dampak pada kesehatan reproduksi bagi perempuan telah memberikan kondisi nyata pada aspek sosial. Hamil diluar nikah telah menimbulkan dampak nyata pada status hukum anak yang dilahirkan, sehingga banyak anak yang lahir tidak memiliki status hukum, akte kelahiran akan menyulitkan secara legalitas negara. Apabila terjadi perceraian, maka tidak mempunyai kekuatan hukum karena tidak tercatat dalam administrasi negara karena perceraian hanya disampaikan secara informal. Tanpa menempuh prosedur hukum atau melalui pengadilan agama mengakibatkan pihak perempuan yang hak-haknya dilanggar demikian juga anak-anak hasil perceraian.

2. Kesehatan Reproduksi

Menikah muda (≤ 19 tahun) berisiko tidak siap melahirkan dan merawat anak secara baik, dan apabila mereka melakukan aborsi, berpotensi melakukan aborsi yang tidak aman dapat membahayakan keselamatan janin/bayi dan ibunya sampai pada kematian. Rendahnya kualitas usia perkawinan - khususnya bagi perempuan - juga mempunyai potensi terjadinya kekerasan oleh pasangan dan apabila terjadi kehamilan tidak diinginkan. Kecenderungan dengan menutup-nutupi kehamilan, maka dimungkinkan tidak mendapatkan layanan kesehatan perawatan kehamilan secara memadai. Berdasarkan data keluarga sejahtera di Kabupaten Wonosobo tahun 2018, terdapat rata-rata usia kawin/NIKAH pertama pada angka 16,9 tahun. Angka tersebut jauh lebih rendah bila dibandingkan dengan rata-rata usia kawin/NIKAH pertama tingkat Jawa Tengah yaitu 22,27 tahun.

Dampak lainnya, apabila remaja dengan kehamilan yang tidak dikehendaki akan menghadapi masalah aib karena hamil tanpa nikah, merasa berdosa karena menggugurkan, seiring dengan semakin bertambahnya usia janin/bayi dalam kandungan semakin besar. Mereka semakin tertekan karena takut menyampaikan kepada orang tua, berselisih dengan keluarga karena hamil, karena perbuatan tersebut dianggap amoral dalam pergaulan, serta melanggar norma masyarakat dan agama, kemungkinan tidak diakui dan ditinggal pacar. Sanksi moral dari masyarakat akan dikucilkan, sehingga apabila kondisi ini dinikahkan dalam kondisi hamil. Meskipun beberapa

---

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Wonosobo, Proyeksi Penduduk Laki-laki dan Perempuan Kelompok umur dan kecamatan, 12 Maret 2019

kasus perkawinan di bawah usia, di mana ibu yang belum cukup umur mengalami kematian karena organ reproduksinya belum siap. Di samping itu, mereka tidak paham tentang kesehatan reproduksi.

3. Psikologis

Dampak psikologis dari pasangan muda yang secara mental belum siap menghadapi perubahan peran dan menghadapi masalah rumah tangga sehingga seringkali menimbulkan penyesalan akan kehilangan masa remaja dan masa sekolah, sehingga menimbulkan rasa kurang percaya diri, minder, mengurung diri dalam pergaulan, karena belum mengetahui bagaimana perubahan perannya dari seorang remaja yang masih muda atau usia sekolah ke peran seorang ibu dan istri saat harus menjadi orang tua di usianya yang masih muda. Kualitas usia perkawinan yang masih rendah berpotensi kekerasan dalam rumah tangga yang mengakibatkan trauma sampai membawa pada kematian, trauma dialami oleh remaja perempuan dalam perkawinan.

Kesimpulan

Kualitas usia perkawinan atau perkawinan anak memiliki dampak yang tidak baik bagi pelaku pasangan suami-istri. dampak multidimensional seperti sosial, ekonomi, budaya, pendidikan, dan kesehatan reproduksi perempuan. Diperlukan penguatan pendidikan terutama wajib belajar minimal sampai jenjang pendidikan menengah tingkat atas (SMA) dalam rangka menunda perkawinan anak atau perkawinan usia dini. Sinergisitas seluruh elemen masyarakat, organisasi masyarakat dan lembaga pemerintah, melalui penguatan peran tokoh agama/ulama, tokoh masyarakat dalam memberikan pemahaman akan pentingnya kematangan atau kedewasaan usia anak dalam melakukan perkawinan.

Perlu meninjau ulang UU No. 1 Tahun 1977 tentang perkawinan dan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Terkait hal ini, kedua undang-undang tersebut memiliki perbedaan mengenai ketentuan batas minimal usia menikah, sehingga secara legal formal terjadi kerancuan implementasinya di masyarakat dan justru menggunakan salah satu undang-undang tersebut melegalkan perkawinan anak di usia muda. Dalam kondisi ini, idelanya undang-undang memiliki persamaan, sehingga tidak menimbulkan dampak dari sudut pandang beberapa aspek sosial, ekonomi, kesehatan, pendidikan dan psikologis.

Daftar Pustaka

- BKKBN, *Konsep Keluarga Sejahtera*, tersedia di <http://jawatengah.bkkbn.go.id>. diakses pada 2 April 2019.
- Badan KB Kabupaten Wonosobo bekerja sama dengan Koalisi Kependudukan dan Pembangunan Kabupaten Wonosobo. *Grand Design Pengendalian Kualitas Penduduk Kabupaten Wonosobo Tahun 2010-2035*.

- Badan KB Kabupaten Wonosobo bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik, Dinas Kesehatan dan BAPPEDA Kabupaten Wonosobo. Profil Kependudukan dan Keluarga Berencana Kabupaten Wonosobo Tahun 2014.
- BKKBN, 2018, *Pendewasaan Usia Perkawinan*, Jakarta: BKKBN Pusat.
- Badan Pusat Statistik, 2010, *Kemajuan yang Tertunda: Analisis Data Perkawinan Usia Anak di Indonesia, Berdasarkan Hasil Susenas 2008-2012 dan Sensus Penduduk 2010*, Jakarta: BPS.
- Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Tengah, 2018, *Kemiskinan Provinsi Jawa Tengah Maret 2018*. No. 47/07/33/Th. XII, 16 Juli 2018.
- Chatib, Munif. 2014, *Orang Tuanya Manusia Melejitkan Potensi dan Kecerdasan dengan Menghargai Fitrah Setiap Anak*, Bandung: Kaifa PT Mizan Pustaka.
- Choe, M.K, S. Thapa, dan S. Achmad, 2001, *Eraly Marriage and Childbearing in Indonesia and Nepal*. East-West Center Working Papers No. 108-15, Honolulu.
- Manuaba, dkk. 2017, *Buku Ilmu Kebidanan, Penyakit Kandungan dan KB untuk Pendidikan Bidan*, Jakarta: EGC.
- Nurhajati L. Wardyaningrum D., 2013, *Komunikasi Keluarga Dalam Pengambilan Keputusan Perkawinan*, Jakarta: Universitas al-Azhar Indonesia.
- Silalhi, Karlinawati. Eko A. Meinarno, 2010. *Keluarga Indonesia Aspek dan Dinamika Zaman*. Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Yunita, A. 2014, *Faktor-faktor yang berhubungan dengan kejadian pernikahan usia muda pada remaja putri di desa Pagerejo Kabupaten Wonosobo*, Wonosobo: STIKES Ngudi Waluyo.